

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Atmasasmita, Romli, 2017, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Bentham, Jeremy, Cetakan Kelima 2019, *Teori Perundang-Undangan*, Penerbit Nuansa Cendikia, Bandung.

Bambang, Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Bambang, Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Candra,dkk, 2012, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Pustaka Larasan, Denpasar.

Dellyana dan Shant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum.*, Liberty, Yogyakarta.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum dan Kehutanan Kementerian LHK, 2017, *Rencana Kerja 2018 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, Jakarta.

_____, 2018, *Laporan Kinerja Ditjen Penegakan Hukum LHK Tahun 2017*, Jakarta, hlm 1.

Ekawati dkk, 2014, “*Sintesis Penelitian Integratif Penguatan Tata Kelola Kehutanan*”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, KLHK, Jakarta.

Faisal, 2014, *Memahami Hukum Progresif*, Thafamedia, Yogyakarta.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Frans, Maramis, Juli 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana Dalam Hukum Pidana Materiil dan Formil*, Kemitraan Partnership, The Asia Foundation, USAID.

Hiariej, O.S Eddy, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Huda, Chairul, 2011, dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan' Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Kencana, Jakarta.

Husin, Sukanda, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Yogyakarta.

Istanto, Sugeng, 2004, *Bahan Kuliah Politik Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Jaya, Ida Bagus, "Pengantar Hukum Pidana", dalam Topo, Eva, *Hukum Pidana Materiil dan Formil*, Kemitraan Partnership, The Asia Foundation, USAID (United States Agency for International Development).

Kaelan MS, Edisi Pertama 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila; Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Paradigma, Yogyakarta.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, " *Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016*", Jakarta, Desember 2017.

Manan, Abdul, Cetakan Ke-3, 2006, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

MD, Mahfud, 2017, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi revisi cetakan 7 PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty*, Yogyakarta.

Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

_____, 2011, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.

- Moleong, Lexy J., 2001, *Metologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Nam, Eka dan Ali Marwan, 2017, *Imu Perundang-Undangan*, CV. Pustaka Prima, Medan.
- Pohan, Agustinus dan Martin Moerings dkk, 2012, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Pustaka Larasan, Bali.
- Prasetyo dan Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2005, *Hukum Pidana Materiil Jilid 2*, Kurnia Kalam, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2013, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- _____, 2001, *Masalah Penegakan: Tinjauan Sosisologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Redi, Ahmad, 2014, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ronny, Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Salim, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Santoso, Chandra, *et al.*, 2011, *Panduan Investigasi dan Penuntutan dengan Pendekatan Hukum Terpadu*, CIFOR, Bogor.
- Soekanto dan Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, 1984, *Masalah- Masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

Soerjono, Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 252 – 264.

Subadi, Oktober 2010, *Penguasaan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan*, PT.Prestasi Pustakaraya, Jakarta.

Sulaiman, King Faisal, 2017, *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*, Thafa Media, Yogyakarta.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, 1997, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Suriansyah, Murhaini, 2012, *Hukum Kehutanan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.

Syamsuddin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*, Lembaran Negara Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209, Tanggal 31 Desember 1981.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karya Moeljatno.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888, Tanggal 30 September 1999.

Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Undang-Undang PPLH), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Lembaran Negara Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432, Tanggal 06 Agustus 2013.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.1/Menlhk-II/2015 tentang Penanganan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tanggal 4 Maret 2015.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 423/Pid.Sus/2015/PN Dum Perihal Peradilan Tingkat Pertama perkara Ashari bin Musa, 17 Februari 2016.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 tentang Pengujian UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999.

D. Karya Ilmiah, Jurnal dan Internet

Anne Larson, *“Hak Tenurial dan Akses Ke Hutan”*, http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BLarson1302.pdf, CIFOR, diunduh tanggal 19 Maret 2019.

Diantoro Totok, *“Perambahan Kawasan Hutan Pda Konservasi Taman Nasional (Studi Kasus TN Tesso Nillo)”*, *Mimbar Hukum*, 3 Oktober 2011.

FAO Forestry Paper, 2005, “Best Practices for Improving Law Compliance In The Forest Sector”, Rome, <http://www.fao.org/3/a0146e/A0146E04.htm>, diunduh Tanggal 1 April 2019.

Ginting Maria Lona, 2015, “Pembuktian Unsur Rencana dan Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, *Tesis* Magister Ilmu Hukum UGM, Yogyakarta, hlm 32. Menurut Komariah Emong Sapadjaja, 2002, “Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi”, PT. Alumni Bandung.

Humas Setkab RI, “Presiden Jokowi Tegaskan Pentingnya Hutan Untuk Kemakmuran Rakyat”, <http://setkab.go.id/presiden-jokowi-tegaskan-pentingnya-hutan-untuk-kemakmuran-rakyat/>, diakses pada tanggal 29 Januari 2019.

ICEL, 2018, “Sebanyak 52 Kasus Perambahan Hutan Riau Belum Ditindaklanjuti”, <https://icel.or.id/sebanyak-53-kasus-perambahan-hutan-riau-belum-ditindaklanjuti/>, diunduh Tanggal 28 Februari 2019.

Ignasius Rolandes, 2017, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Kabupaten Sleman Yogyakarta”, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum UGM, Yogyakarta.

Indriyanto Seno Adji, “Overheidsbeleid” dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Keadilan*, Vol. 4, No. 2, 2005/2006.

Huda Al, 2015, “Konsistensi Distribusi Kewenangan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pelayaran Angkutan Penumpang”, *Tesis* Magister Hukum Bisnis UGM, Yogyakarta.

Luca Tacconi, Paolo Omar et al., “Defining Illegal Forest Activities and Illegal Logging”, dalam Daniela Kleinschmit, et al., *A Global Scientific Rapid Response Assessment Report*, IUFRO (International Union of Forest Research Organizations) World Series and CPF (Collaborative Partnership on Forest), Volume. 35, Vienna, diunduh dari <http://dspace.stir.ac.uk/handle/1893/24818#.XJ5jDWiYNdg> Tanggal 30 Maret 2019.

Noor Ifan Luthfian, 2004, “Perambahan Hutan Di Kawasan Taman Nasional Kutai (Penelitian di Empat Desa Definitif di

Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur)”, Tesis, Magister Ilmu Sosial Universitas Gadjah Mada.

Ndimuri Samaul Bait, 2005, “Konflik perambahan kawasan hutan dan implikasinya terhadap ketahanan wilayah; (studi kasus di Kawasan Hutan Kontu Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara)”, Tesis, Magister Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada.

Purwoleksono Endro Didik, “Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia”, *Arena Hukum*, Nomor 15, November 2001.

San Afri Awang, “Dinamika Proses RUU Kehutanan (disparitas cita dan fakta)”, www.arupa.or.id/paper/25.htm.

Sani Rasio Ridho, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian LHK, “Penyelesaian Konflik Tenurial Kawasan Hutan Melalui Perhutanan Sosial, Mediasi dan Penegakan Hukum”, materi dalam Seminar Hukum, Mahasiswa Kelas Kerjasama KLHK dan Fakultas Hukum UGM, UGM, Yogyakarta, 26 April 2018.

Satyawati Pudyaatmoko, tim pakar revisi UU Kehutanan dari Fakultas Hukum UGM, “Indonesia Darurat Hutan” <https://ugm.ac.id/id/news/13675indonesia.darurat.hutan.ugm.de.sak.pemerintah.ganti.uu.kehutanan>, diunduh tanggal 20 Desember 2018.

Supriyadi, 2015, “Reformulasi Kewenangan Mengadili Tindak Pidana Umum oleh Militer di Indonesia”, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum UGM, Yogyakarta, hlm 115, menurut Sudarto, “Kapita Selekta Hukum Pidana”.

Wildlife and Forest Crime, <https://www.unodc.org/unodc/en/wildlife-and-forest-crime/overview.html>, diunduh Tanggal 28 Maret 2019.

You Chang Yeo et al, “Forest Policy and Economics, Elsevier”, 76 (2017) 14-24, Available online in ScienceDirect, 2016, diunduh Tanggal 3 November 2018.